

# PEMANFAATAN TEKNOLOGI DIGITAL SEBAGAI PERCEPATAN BERUSAHA OLEH EKONOMI KREATIF

## UTILIZATION OF DIGITAL TECHNOLOGY AS A ACCELERATION OF TRYING BY THE CREATIVE ECONOMY

**Putri Pradnyawidya Sari**

Balai Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Penelitian Komunikasi dan Informatika  
(BPSDMP KOMINFO) Surabaya

Jl. Raya Ketajen No. 36, Gedangan, Sidoarjo, Indonesia

Diterima : 22 November 2018| Direvisi : 24 November 2018| Disetujui : 30 November 2018

### **Abstract**

*The Creative Economy Contribution (Ekraf) has increased every year, even its growth is above the growth of the electricity, gas and water, mining and quarrying, agriculture, farming, forestry and fisheries, services and processing industries. Accordingly the Government Regulation (PP) number 24 of 2018 was issued regarding business licensing through One Single Submission (OSS), an integrated online licensing system. One of the objectives of OSS is to facilitate business licensing, especially for creative economic actors. The presence of OSS has made the regional licensing public service changes existing management systems and infrastructure procedures. This study intends to formulate strategic planning for the development of IS / IT related to business licensing systems especially the integration of One Single Submission (OSS). Using the Information Systems Strategic Planning (PSSI) method and SWOT analysis, this study resulted in IS development strategic plan for Banyuwangi Regency, the location where this case study took place.*

**Keywords :** OSS, SWOT, PSSI

### **Abstrak**

Kontribusi Ekonomi Kreatif (Ekraf) mengalami peningkatan setiap tahun, bahkan pertumbuhannya berada diatas pertumbuhan sektor listrik, gas dan air bersih, pertambangan dan penggalian, pertanian, peternakan, kehutanan dan perikanan, jasa-jasa dan industri pengolahan. Berdasarkan hal tersebut maka terbitlah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 tahun 2018 mengenai perizinan berusaha melalui *One Single Submission* (OSS) yaitu sebuah sistem perizinan online yang terintegrasi. Salah satu tujuan OSS adalah untuk mempermudah perizinan berusaha terutama bagi pelaku ekonomi kreatif. Hadirnya OSS membuat Dinas Perizinan Pelayanan Publik di daerah merubah prosedur perizinan dan sistem manajemen maupun infrastruktur yang sudah ada. Berdasarkan beberapa hal tersebut diatas maka penelitian ini bermaksud merumuskan Perencanaan Strategis Pengembangan SI/TI terkait sistem perizinan usaha yang berkaitan dengan pengintegrasian *One Single Submission* (OSS). Hasil dari penelitian ini adalah suatu rumusan strategis untuk mengembangkan sistem perizinan yang terintegrasi dengan OSS. Dengan menggunakan metode Perencanaan Strategis Sistem Informasi (PSSI) dan analisis SWOT di Kabupaten Banyuwangi sebagai lokasi untuk studi kasus maka penelitian ini menghasilkan sebuah rencana strategis pengembangan sistem informasi salah satunya integrasi sistem dengan OSS.

**Kata kunci :** OSS, SWOT, PSSI

## **PENDAHULUAN**

Kontribusi Ekonomi Kreatif (Ekraf) mengalami peningkatan setiap tahun, bahkan pertumbuhannya berada diatas pertumbuhan sektor listrik, gas dan air bersih, pertambangan dan penggalian, pertanian, peternakan, kehutanan dan perikanan, jasa-jasa dan industri pengolahan. Hasil data statistik ekonomi kreatif 2016 menunjukkan bahwa dalam kurun waktu 2010-2016, besaran Produk Domestik Bruto (PDB) ekonomi kreatif naik dari 525,96 triliun menjadi 922,59 triliun (meningkat rata-rata

10,14% per tahun). Sektor tenaga kerja ekonomi kreatif mengalami pertumbuhan dari tahun 2015 ke tahun 2016 sebesar 5,95% yaitu jumlah tenaga kerja ekonomi kreatif di tahun 2015 yaitu sebanyak 15,96 juta jiwa yang jika dipersentasekan terhadap tenaga kerja nasional sebesar 13,90% dan ditahun 2016 tenaga kerja ekonomi kreatif sebanyak 16,91 juta jiwa atau persentase sebesar 14,28%.

Untuk membantu kemudahan usaha di sektor ekonomi kreatif maka terbit Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 91 Tahun 2017 Tentang

Percepatan Pelaksanaan Berusaha yang ditetapkan Presiden Joko Widodo sejak 26 September 2017. Perpres ini merupakan langkah besar pemerintah untuk mempercepat perizinan berusaha yang ada. Peraturan ini diterbitkan menimbang bahwa perijinan berusaha yang diterbitkan oleh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah untuk memulai, melaksanakan, dan mengembangkan kegiatan usaha, perlu ditata kembali agar menjadi pendukung dan bukan sebaliknya menjadi hambatan perkembangan kegiatan usaha.

Sistem pelayanan dan regulasi kegiatan berusaha perlu penataan ulang yang sesuai dengan tuntutan dunia usaha, perkembangan teknologi, dan persaingan global agar semakin memudahkan kegiatan usaha. Berdasarkan hal tersebut maka terbitlah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 tahun 2018 mengenai perijinan berusaha melalui *One Single Submission* (OSS) yaitu sebuah sistem perijinan online yang terintegrasi. Dalam hal ini terdapat penugasan secara khusus kepada Kementerian Kominfo antara lain menyediakan nama laman sistem Perizinan Berusaha terintegrasi dan memberikan dukungan infrastruktur telekomunikasi yang diperlukan oleh kementerian/lembaga, daerah provinsi, dan daerah kabupaten/kota. (Sumber: Dirjen Aptika Kemkominfo).

Dalam hal ini Menkominfo menunjuk Dirjen Aptika sebagai Ketua Satgas di lingkungan Kemkominfo, dengan tugas utama:

- a. Penyediaan domain bagi portal Pelayanan Publik terintegrasi Nasional
- b. Penyediaan infrastruktur DC dan Akses internet (Bagi pelayanan publik strategis)
- c. Integrasi dan interoperabilitas data elektronik lintas Perijinan/pelayanan antar K/L/D (Tim Pengembang & Teknologi Integrasi Berbasis Cloud)
- d. Penyediaan *dashboard*

Dalam mengimplementasikan Perpres No 91 Tahun 2017 menemukan permasalahan dan hambatan di lapangan mengingat kebijakan dan produk kebijakan mengenai perizinan berusaha disetiap kabupaten/kota berbeda.

Berdasarkan beberapa hal tersebut diatas maka pada penelitian ini memilih lokasi Kabupaten Banyuwangi sebagai studi kasus dan bermaksud merumuskan perencanaan strategis pengembangan SI/TI terkait sistem perijinan usaha yang berkaitan dengan pengintegrasian *One Single Submission* (OSS). Hal ini merupakan salah satu upaya untuk

mewujudkan percepatan pelaksanaan berusaha dengan mengoptimalkan penggunaan teknologi digital. Kabupaten Banyuwangi merupakan kota yang relevan pada penelitian ini karena merupakan kabupaten yang dipilih oleh Bekraf untuk bekerja sama dalam mengembangkan ekonomi kreatif berbasis pariwisata. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dan Bekraf menanda tangani nota kesepahaman (MoU) terkait kerja sama komprehensif untuk mengembangkan industri kreatif berbasis desa. Selain itu penelitian ini juga menggambarkan secara kuantitatif mengenai kesiapan masyarakat memanfaatkan sistem perijinan OSS.

#### *Kajian Penelitian Terdahulu*

Perencanaan strategi sistem informasi pernah diimplementasikan pada beberapa institusi pendidikan tinggi salah satunya adalah Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi dan Sekretaris Tarakanita. Penulis pada kajian mengenai Perencanaan Strategi Sistem Informasi pada institusi pendidikan tinggi adalah Yoseph Hendrik Maturbongs dan Riri Satria. Dalam kajiannya yang berjudul "Perencanaan Strategis Sistem Informasi Pada Institusi Pendidikan Tinggi" mengambil studi kasus pada Sekolah Tinggi Komunikasi dan Sekretaris Tarakanita yang merupakan salah satu lembaga pendidikan yang sudah berdiri sejak tahun 1968. Didalam kajian tersebut terdapat permasalahan yaitu perumusan strategi bisnis yang kurang didukung oleh analisis data yang handal, pelayanan terhadap pelanggan, kurang optimal penggunaan sumber daya dan jumlah lulusan yang semakin menurun. Dengan menggunakan tools dari Perencanaan Strategi Sistem Informasi maka hasil dari kajian ini adalah sebuah perencanaan strategis dalam bentuk identifikasi kebutuhan SI/TI yang tergambarkan dalam portofolio aplikasi mendatang.

#### **Kajian Teori**

Perencanaan strategis SI/TI merupakan proses identifikasi portofolio aplikasi SI berbasis komputer yang akan mendukung organisasi dalam pelaksanaan rencana bisnis dan merealisasikan tujuan bisnisnya. Perencanaan adalah gambaran jelas bagaimana para pengambil keputusan memandang masa depan dengan menggunakan metode perencanaan formal.

Menurut Cassidy, terdapat beberapa manfaat dari perencanaan strategis sistem informasi:

1. Manajemen yang efektif untuk aset perusahaan yang dianggap penting.

2. Meningkatkan hubungan dan komunikasi dalam organisasi bisnis dan SI
3. Menyelaraskan tujuan dan prioritas SI dan bisnis
4. Identifikasi peluang pemanfaatan teknologi untuk *competitive advantage* dan untuk menambah *value* bisnis
5. Membuat perencanaan alur proses dan aliran informasi
6. Mengalokasikan sumber daya secara efektif dan efisien
7. Mengurangi usaha dan biaya yang dibutuhkan

Metodologi pengembangan bersifat sistematis dan terarah untuk memperoleh hasil sesuai dengan rencana. Kunci utama keberhasilan metodologi terletak pada kemudahan integrasi dari reengineering dan optimalisasi kegiatan. Reengineering merupakan suatu perubahan proses bisnis menuju hal yang lebih efisien dan efektif. Optimalisasi menyangkut peningkatan efisiensi dan efektifitas dalam mengatur orang, uang, waktu, mesin dan sistem menuju hasil yang ingin dicapai. Penggunaan suatu metodologi secara konsisten akan membuahkan beberapa hal utama, yaitu:

- a. Meningkatkan kualitas dari hasil yang ingin dicapai;
- b. Meningkatkan efisiensi;
- c. Meningkatkan produktivitas;
- d. Meningkatkan jangka waktu pencapaian target;
- e. Membantu kegiatan awal menjadi lebih terarah;
- f. Membantu kelancaran tahap implementasi;
- g. Mewujudkan kesepakatan akan standar dan tolak ukur yang digunakan.

## METODE

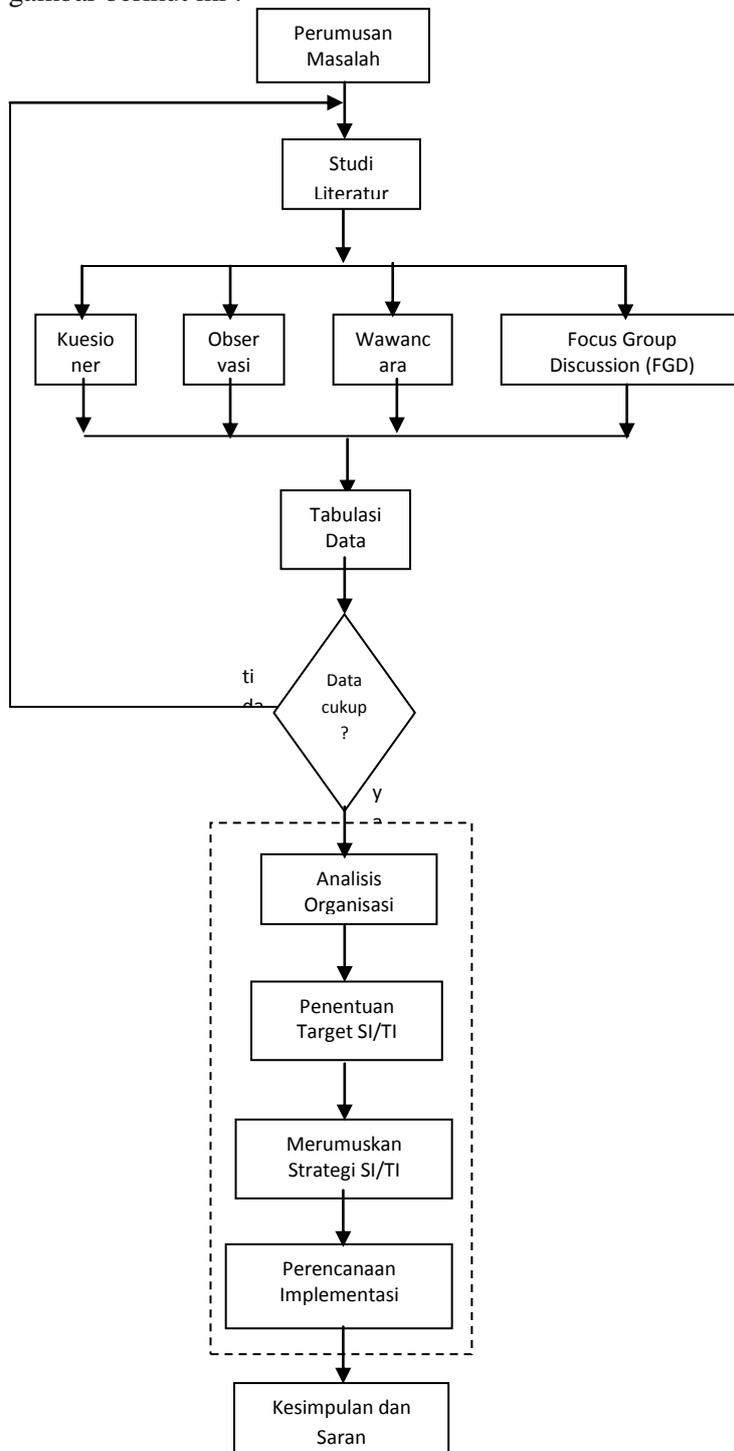
Perencanaan strategis yang baik diperlukan metodologi yang dapat menganalisis kondisi satu organisasi sehingga dapat mempresentasikan keadaan yang sesungguhnya. Metodologi merupakan salah satu hal terpenting yang harus ditentukan agar perencanaan strategis SI/TI yang dibuat dapat digunakan dengan optimal (Ziyad, 2007).

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah pra survei dengan melakukan observasi serta interview bersama beberapa pejabat dari DPMPSTP serta Mall Pelayanan Publik. Survei dengan melakukan pengumpulan data membagikan kuesioner ke pemohon pelayanan perijinan dan pejabat pelayanan perijinan, serta mengadakan acara *Focus Group Discussion* (FGD) yang dihadiri oleh staff

ahli menteri bidang teknologi dan beberapa pejabat dari beberapa dinas yang terkait.

## Desain Penelitian

Langkah-langkah dan alur proses pembuatan rencana strategis pengembangan sistem informasi pelayanan perijinan dapat dilihat pada desain gambar berikut ini :



Gambar 1. Desain Penelitian

Keterangan Diagram :

#### Perumusan Masalah

Didalam rumusan masalah akan dibuat sebuah tabel identifikasi masalah yang didapatkan dari data-data hasil observasi serta FGD. Permasalahan mengenai pengintegrasian sistem pelayanan perijinan dengan OSS yang disediakan oleh lembaga OSS dan Kemkominfo.

#### Studi Literatur

Pada tahap ini penulis melakukan pencarian data berbagai sumber tertulis baik berupa buku-buku, arsip, majalah, artikel dan jurnal atau dokumen-dokumen yang relevan dengan permasalahan yang akan dikaji. Sehingga informasi yang didapat dapat dijadikan rujukan atau referensi dalam memperkuat penelitian ini.

#### Pengumpulan Data

Pengumpulan data dengan memanfaatkan kuesioner sebagai alat survei yang berupa beberapa pertanyaan tertulis, responden yang menjawab pertanyaan dalam kuesioner ini adalah masyarakat pemohon perijinan yang berada di mall pelayanan publik di Banyuwangi. Observasi dan pengamatan dilakukan di kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PM dan PTSP) Kabupaten Banyuwangi. Dari observasi tersebut mendapatkan data mengenai visi dan misi dari kantor Dinas PM dan PTSP serta Mall Pelayanan Publik. Untuk memperoleh keterangan informasi dilakukan wawancara atau in depth interview ke beberapa informan antara lain dengan beberapa pejabat yang ada di DPMPTSP Kabupaten Banyuwangi dan pejabat di Dinas Kominfo Kabupaten Banyuwangi.

FGD dihadiri oleh perwakilan dari beberapa dinas di Kabupaten Banyuwangi yang terkait dengan pelayanan perijinan antarlain Dinas Penanaman Modal dan PTSP (DPMPTSP) Kab. Banyuwangi, DPMPTSP Prop. Jatim, Dinas Kominfo Kab. Banyuwangi, Dinas Kominfo Prop. Jatim, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (DUKCAPIL), Dinas Pariwisata, Dinas PU dan juga Staff Ahli Menteri Bidang Teknologi Kemkominfo. FGD di pimpin oleh moderator dari Universitas Trunojoyo.

#### Tabulasi Data

Tabulasi dikerjakan dengan menggunakan metode deskripsi umum yang meliputi scoring terhadap item-item yang ada pada kuesioner. Adapun pengolahan data secara statistik

menggunakan aplikasi SPSS. Pada penelitian ini data statistik diperoleh dari kuesioner dengan pemohon perijinan sebagai responden.

#### Analisa Organisasi

Analisis lingkungan organisasi dilakukan agar diperoleh informasi yang jelas dan tepat berkaitan dengan keadaan internal organisasi seperti gambaran umum, visi misi, tujuan proses bisnis, mengenai kondisi eksternal organisasi serta kondisi SI/TI baik internal maupun eksternal.

#### Merumuskan Strategi

Selanjutnya pada tahap ini adalah sebuah perencanaan berdasarkan visi dan misi SI dan berdasarkan kondisi yang telah dipahami pada tahapan sebelumnya. Pada tahap ini baru dapat menentukan arahan sistem informasi kedepannya. Pada tahap ini juga akan disusun rencana pengembangan SI.

#### Perencanaan Implementasi

Rencana implementasi yang dilakukan terhadap strategi SI/TI, pada tahap ini menghasilkan sebuah portofolio aplikasi mendatang.

#### Kesimpulan dan Saran

Merupakan kesimpulan dari keseluruhan pembahasan dan analisis yang di lakukan pada tahapan sebelumnya. Saran adalah sebuah rekomendasi berdasarkan hasil pembahasan dan analisis.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Lokasi penelitian ini adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Banyuwangi. Kondisi saat ini DPMPTSP sudah bergabung dengan pelayanan publik yang lain yaitu di Mall Pelayanan Publik. Mall tersebut telah melayani 142 pelayanan kepada masyarakat.

#### Kondisi *Existing*

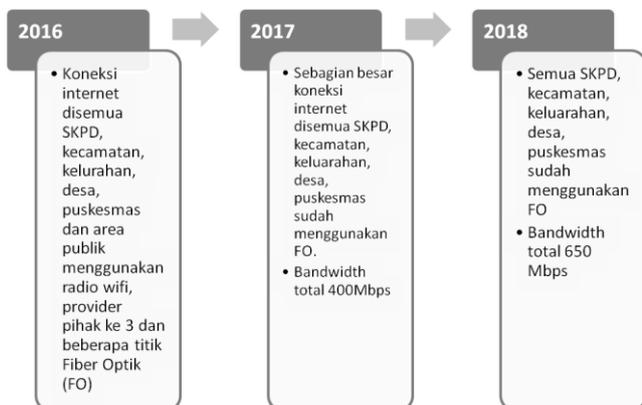
Kondisi existing layanan sistem informasi manajemen (SIM) perijinan dan infrastruktur dapat dilihat pada diagram roadshow sistem perijinan DPMPTSP Kabupaten Banyuwangi, dari mulai awal implementasi SIM perijinan sampai dengan memiliki inovasi antarlain memakai tanda tangan digital, system terintegrasi dengan Perbankan sampai dengan melayani perijinan usaha kecil cukup dengan telepon.



Gambar 2. Diagram Roadshow SIM Perizinan

Untuk Teknologi Komunikasi dan Informasi (TIK) pelayanan perizinan, server aplikasi sudah berada terpusat di Dinas Kominfo Banyuwangi dengan proteksi firewall, baik dari sisi internal dan publik. Dengan adanya IPS/IDS dan web *application firewall* dapat meminimalisir terjadinya gangguan dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

Untuk *network security*, akses ke jaringan pemkab sudah dilindungi oleh antarlain firewall, dengan fitur IPS/IDS, antivirus, spamming, botnet dan lain lain, untuk *layer web application*, dilindungi oleh *firewall* khusus untuk proteksi web, sehingga dari *network* publik ataupun private harus melalui dua *firewall* untuk dapat mengakses *web application*. Untuk *computer security* pemkab sudah mulai melengkapi computer client dengan anti virus corporate yang bisa termonitor oleh *firewall*.



Gambar 3. Diagram Roadshow infrastruktur TIK

Hadirnya OSS tentu saja mempengaruhi kebutuhan SI/TI dan juga SDM nya. Perkembangan sistem perizinan tersebut berpengaruh terhadap keputusan-keputusan strategis yang harus dilakukan untuk penyesuaian terhadap perubahan sistem yang berkembang saat ini. Dengan demikian keputusan dalam pemilihan penggunaan teknologi merupakan satu keharusan untuk menjaga sustainable/keberlangsungan dari organisasi pelayanan perizinan. Dalam tabel berikut ini adalah identifikasi masalah yang ditemukan dan kemungkinan solusi yang akan diambil :

Tabel 1. Skala Linkert Sarana dan Prasarana Pejabat ASN

No	Masalah	Kemungkinan Solusi	Perencanaan Sistem SI/TI
1	Implementasi Sistem Baru	Integrasi Sistem OSS	Ya
2	Keamanan Data Pribadi	Cyber Security	Ya
3	Manajemen Operasional	Manajemen OSS	Ya
4	Kompetensi SDM SI/TI	Sistem SDM	Ya

**Analisis Lingkungan Internal**

Suatu evaluasi yang komprehensif dari lingkungan internal terhadap kekuatan dan kelemahan yang dimiliki oleh suatu organisasi dalam rangka melaksanakan tugas, pokok dan fungsinya. Analisa kondisi internal terdiri dari dua hal yaitu kekuatan/*strengths* dan kelemahan/*weakness*.

*Kekuatan (Strengths)*

Kekuatan adalah sumberdaya, keterampilan, atau keunggulan-keunggulan lain relatif terhadap pesaing dan kebutuhan pasar yang dilayani atau ingin dilayani oleh instansi.

- Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik dan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 56 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik merupakan dasar kebijakan yang kuat bagi DPMPTSP Kabupaten Banyuwangi untuk menempati satu gedung mall yang menjadi satu dengan SKPD lain yang saling terkait dalam melakukan proses perizinan usaha. Ini merupakan kekuatan untuk mewujudkan salah satu misi DPMPTSP Kabupaten Banyuwangi

yaitu Meningkatkan Pelayanan Perizinan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel. Didalam mall pelayanan perizinan maka sistem Perencanaan, Pemrosesan dan Pengelolaan Perizinan telah terpadu dalam satu atap.

- b. Memiliki Komitmen dan janji mengenai integritas pelayanan perizinan yang tertuang dalam Permen Pan dan RB Nomor 36 Tahun 2012 yang berisi Dengan ini, kami menyatakan sanggup menyelenggarakan pelayanan sesuai standar pelayanan yang telah ditetapkan dan apabila tidak menepati janji ini, kami siap menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku ". Dengan adanya komitmen tersebut maka SDM nya mengikuti perkembangan teknologi dan memiliki SDM yang cukup berkompeten.
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor : 2 Tahun 2015 tentang Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Kabupaten Banyuwangi
- d. Standar Pelayanan Publik (SPP) pelayanan perizinan BPPT Kabupaten Banyuwangi ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 13 Tahun 2016. Untuk mendukung operasionalisasi pelayanan perizinan di tetapkan Standar Operasional Prosedure berdasarkan Surat Keputusan Kepala BPPT Kabupaten Banyuwangi Nomor 188/23/429.207/2016 Tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) pada BPPT.
- e. Pelayanan Pemrosesan perizinan dilakukan menggunakan SIM Perizinan. Pendaftaran Izin on-line (SIPO). Penerbitan perizinan melalui SPIPISE. Apabila persyaratan telah lengkap, penerbitan Surat Izin memerlukan waktu yang relatif singkat. Tidak melebihi batas waktu yang telah ditetapkan dalam SPP dan SOP. Pelayanan 1 hari selesai (*one day service*) bagi izin non Tinjau Lokasi
- f. Dibentuk *Help Desk*. Dibentuk Desk Pengaduan (on-line, SMS, Telp, Surat).
- g. Memiliki inovasi antara lain fasilitas Cafe Investasi PM, fasilitas Press Room, Pelayanan Perizinan Keliling / *Mobile Service*, *SIM* terintegrasi dengan Perbankan, Bank di BPPT (*payment poin*), One Call Finished (OCF).
- h. Terpusatnya infrastruktur teknologi di Kominfo kabupaten Banyuwangi serta sarana dan prasaranan yang cukup memadai.

#### *Kelemahan ( Weaknesses)*

- a. Bersama dengan munculnya Perpres No. 91 Tahun 2017 tentang percepatan pelaksanaan berusaha yang mengamanatkan system perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik (One Single Submission /OSS) maka Sistem pada DPMPTSP belum terintegrasi, masing-masing SKPD masih menggunakan aplikasinya sendiri-sendiri.
- b. Sistem Informasi Perizinan masih menggunakan SI yang lama sedangkan sekarang dianjurkan untuk menggunakan siCantik dan siMantra dari Kemenkominfo.
- c. Database belum berbasis Cloud yang dianjurkan menggunakan siCantik Cloud.
- d. Pelayanan Sistem Perizinan sudah berbasis web namun masih banyak masyarakat yang belum memanfaatkannya secara maksimal.
- e. Sistem manajemen organisasi yang belum mapan, ditandakan belum adanya grand design/master plan IT sehingga belum ada inovasi teknologi dimasa yang akan datang, belum ada instrumen kinerja yang belum terstandar.
- f. Belum ada akses buat Top management untuk memantau kinerja system perizinan.

#### **Analisis Lingkungan Eksternal**

Suatu evaluasi terhadap perubahan lingkungan yang dapat berakibat terhadap timbulnya suatu peluang baru ataupun menjadi ancaman terhadap organisasi dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsinya. Analisa kondisi eksternal terdiri dari dua hal yaitu peluang/opportunity dan ancaman/threat.

#### *Peluang (Opportunity)*

- a. Adanya kebijakan nasional untuk mendukung penyelenggaraan penanaman modal yang terintegrasi dengan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).
- b. Didukung oleh Dinas Kominfo secara teknis dalam pelayanan penanaman modal melalui Tim Taskforce dan pelayanan perizinan melalui Tim IT. Tim IT dari Dinas Kominfo selalu meng update teknologi.
- c. Memiliki fasilitas ruang tempat untuk pelaksanaan gerai pelayanan perizinan di dan layanan Informasi Potensi Peluang Investasi.
- d. SDM yang cukup pro aktif.

*Ancaman (Threat)*

- a. Belum semua data base penanaman modal dan perizinan terintegrasi dengan SKPD terkait.
- b. Kemampuan pemohon dan stakeholder dalam menggunakan internet
- c. Konektifitas jaringan dengan SKPD teknis belum berfungsi.
- d. Penggunaan jaringan dan internet yang masih sangat kurang menyebabkan komunikasi masih manual sehingga lemahnya koordinasi dengan Kabupaten/Kota dan stakeholder.

**Analisis Strategi DPMPTSP Kabupaten Banyuwangi menurut Analisis SWOT**

*Strategi (S-O):*

- a. Meningkatkan peran DPMPTSP dalam pengembangan potensi investasi di Kabupaten Banyuwangi dengan memanfaatkan teknologi.
- b. Memanfaatkan system terintegrasi (OSS) dalam melaksanakan pelayanan perizinan terpadu satu pintu;
- c. Pelayanan perizinan terpadu satu pintu dilakukan secara profesional berdasarkan SOP, grand design/master plan.
- d. Dukungan Pemerintah Pusat maupun komitmen pimpinan daerah sebagai pendorong untuk segera melaksanakan pengembangan system (migrasi ke system yang baru) untuk perizinan terpadu satu pintu.

*Strategi (W-O):*

- a. Meningkatkan kuantitas dan kualitas SDM aparatur dalam merencanakan pengembangan penanaman modal berdasarkan potensi investasi di Kabupaten Banyuwangi;
- b. Meningkatkan penyediaan sarana prasarana DPMPTSP sehingga dapat mengikuti perkembangan teknologi informasi yang ada;
- c. Menyiapkan data based potensi investasi dan perizinan daerah yang terintegrasi.
- d. Pelayanan perizinan dilaksanakan dengan sistem pelayanan terpadu satu pintu dengan terintegrasi dengan kebijakan pusat;

*Strategi (S-T):*

- a. Meningkatkan profesionalisme aparat DPMPTSP guna menghadapi persaingan pelayanan investasi dengan daerah lain;
- b. Meningkatkan koordinasi dan meningkatkan pelibatan instansi terkait dalam penyelenggaraan penanaman modal di daerah;
- c. Meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat tentang arti pentingnya keberadaan OSS;

- d. Meningkatkan koordinasi dengan SKPD terkait dalam perizinan mengenai proses integrasi data;
- e. Dukungan komitmen pimpinan untuk meningkatkan pelayanan perizinan diperkuat dengan pengkajian peraturan perundangan terkait.

*Strategi (W-T):*

- a. Meningkatkan kualitas SDM aparatur dalam pelayanan penanaman modal;
- b. Menyediakan data based potensi investasi daerah dalam rangka menunjang koordinasi dengan instansi terkait dalam penyelenggaraan penanaman modal di daerah;
- c. Meningkatkan penyediaan sarana prasarana DPMPTSP guna meningkatkan pemahaman investasi kepada instansi terkait maupun kepada masyarakat.

Dari analisis SWOT tersebut maka dapat dibuat matriks SWOT yang dapat dilihat pada gambar 4.

**Perumusan Strategi**

Dengan didasari pada Visi, Misi dan Tujuan lembaga, maka dirumuskanlah strategi sebagai berikut :

1. Mensosialisasikan sistem OSS baik ke ASN pelayanan publik maupun kepada masyarakat.
2. Memanfaatkan nama laman dan infrastruktur telekomunikasi yang telah disediakan oleh Kemkominfo.
3. Memanfaatkan Aplikasi SiCantik Cloud dan siMantra untuk mengintegrasikan Sistem pelayanan dengan sistem OSS.
4. Beberapa rekomendasi model untuk implementasi atau konversi ke sistem yang baru antaralain Model *Cut Off* yaitu mengimplementasikan sistem baru dengan cara menghentikan sistem lama dan menggantikannya dengan sistem baru. Model Paralel yaitu implementasi dengan cara sistem baru dan sistem lama sama-sama dijalankan. Model *Pilot Project* yaitu Pendekatan ini dilakukan dengan cara menerapkan sistem baru hanya pada lokasi tertentu yang diperlakukan sebagai pelopor. Jika konversi ini dianggap berhasil, maka akan diperluas ke tempat-tempat yang lain.
5. Bimtek untuk oprator dan SDM lainnya.
6. Mengintegrasikan semua sistem yang terkait.
7. Merancang grand design untuk implementasi teknologi.

	<b>STRENGTHS (S)</b>	<b>WEAKNES (W)</b>
<b>ANALISIS LINGKUNGAN INTERNAL</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Memiliki Aspek Legalitas kelembagaan pelayanan perijinan kedalam pelayanan terpadu satu pintu dengan memiliki gedung sendiri yaitu mal perizinan (Per Men PAN &amp; Reformasi Birokrasi RI Nomor <b>23 Tahun 2017</b> Ttg Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik dan PerBup Banyuwangi Nomor <b>56 Tahun 2017</b> Ttg Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik)</li> <li>Kepemimpinan yg kuat (Beberapa legalitas bupati untuk mendukung pelaksanaan PTSP)</li> <li>SDM Berintegritas (tertuang dalam Permen Pan dan RB Nomor 36 Tahun 2012)</li> <li>Memiliki Inovasi Pelayanan Perizinan.</li> <li>Infrastruktur IT yang cukup untuk mensupport system perizinan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Sistem Database pelayanan perizinan belum terintegrasi. Pendaftaran belum menggunakan <i>One Stop Submisson (OSS)</i>.</li> <li>Aplikasi perizinan masih menggunakan aplikasi yang lama. Sedangkan oleh Pemerintah dianjurkan utk ke Aplikasi siCanti dan siMantra yang dikeluarkan oleh Kemkominfo.</li> <li>Database belum berbasis Cloud (siCantik Cloud).</li> <li>Masyarakat belum siap dengan system berbasis web.</li> <li>Belum adanya grand design/master plan IT sehingga belum ada inovasi teknologi dimasa yang akan datang.</li> <li>Belum ada akses buat Top management untuk memantau kinerja system perizinan.</li> </ol>
<b>ANALISIS LINGKUNGAN EKSTERNAL</b>		
<b>OPPORTUNITY (O)</b>	<b>STRATEGI S-O</b>	<b>STRATEGI W-O</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>Adanya kebijakan nasional yg mendukung penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan terintegrasi secara elektronik (OSS)</li> <li>Didukung oleh Dinas Kominfo secara teknis melalui Tim Taskforce dan pelayanan perizinan melalui Tim IT</li> <li>Memiliki fasilitas ruang tempat untuk pelaksanaan gerai pelayanan perizinan di dan layanan Informasi Potensi Peluang Investasi.</li> <li>SDM yang cukup pro aktif.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Meningkatkan peran DPMPPTSP dalam pengembangan potensi investasi di Kabupaten Banyuwangi dengan memanfaatkan teknologi.</li> <li>Memanfaatkan system terintegrasi (OSS) dalam melaksanakan pelayanan perizinan terpadu satu pintu;</li> <li>Pelayanan perizinan terpadu satu pintu dilakukan secara profesional berdasarkan SOP, grand design/master plan.</li> <li>Dukungan Pemerintah Pusat maupun komitmen pimpinan daerah sebagai pendorong untuk segera melaksanakan pengembangan system (migrasi ke system yang baru) untuk perizinan terpadu satu pintu.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Meningkatkan kuantitas dan kualitas SDM aparatur dalam merencanakan pengembangan penanaman modal berdasarkan potensi investasi di Kabupaten Banyuwangi;</li> <li>Meningkatkan penyediaan sarana prasarana DPMPPTSP sehingga dapat mengikuti perkembangan teknologi informasi yang ada;</li> <li>Menyiapkan data based potensi investasi dan perizinan daerah yang terintegrasi.</li> <li>Pelayanan perizinan dilaksanakan dengan sistem pelayanan terpadu satu pintu dengan terintegrasi dengan kebijakan pusat;</li> </ol>
<b>TREAT (T)</b>	<b>STRATEGI S-T</b>	<b>STRATEGI W-T</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>Belum semua data base penanaman modal dan perizinan terintegrasi dengan SKPD terkait.</li> <li>Kemampuan pemohon dan stakeholder dalam menggunakan internet</li> <li>Konektifitas jaringan dengan SKPD teknis belum berfungsi.</li> <li>Penggunaan jaringan dan internet yang masih sangat kurang menyebabkan komunikasi masih manual sehingga lemahnya koordinasi dengan Kabupaten/Kota dan stakeholder..</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Meningkatkan profesionalisme aparat DPMPPTSP guna menghadapi persaingan pelayanan investasi dengan daerah lain;</li> <li>Meningkatkan koordinasi dan meningkatkan pelibatan instansi terkait dalam penyelenggaraan penanaman modal di daerah;</li> <li>Meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat tentang arti pentingnya keberadaan OSS;</li> <li>Meningkatkan koordinasi dengan SKPD terkait dalam perizinan mengenai proses integrasi data;</li> <li>Dukungan komitmen pimpinan untuk meningkatkan pelayanan perizinan diperkuat dengan pengkajian peraturan perundangan terkait.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Meningkatkan kualitas SDM aparatur dalam pelayanan penanaman modal;</li> <li>Menyediakan data based potensi investasi daerah dalam rangka menunjang koordinasi dengan instansi terkait dalam penyelenggaraan penanaman modal di daerah;</li> <li>Meningkatkan penyediaan sarana prasarana DPMPPTSP guna meningkatkan pemahaman investasi kepada instansi terkait maupun kepada masyarakat.</li> </ol>

Gambar 4. Matriks SWOT

## KESIMPULAN

1. Membutuhkan integrasi data elektronik lintas perijinan/pelayanan antar K/L/D berbasis *cloud* yang menggabungkan data dari berbagai sumber database yang berbeda. Hal ini dikarenakan terdapat kesamaan data yang dibutuhkan oleh antar instansi, contohnya data penduduk yang ada di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) sehingga terhindar adanya duplikasi data. Namun salah satu syarat pengintegrasian data tersebut adalah adanya jaminan keamanan data pribadi yang akan di share ke instansi terkait.
2. Bagi dinas perizinan yang belum memiliki atau belum menggunakan sistem perijinan secara elektronik seperti SPIPISE (Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik) maka dianjurkan untuk menggunakan sistem perizinan yang dikeluarkan oleh Kemkominfo SICANTIK CLOUD ( Aplikasi Cerdas Layanan Perizinan Terpadu untuk Publik) yang merupakan aplikasi berbasis *web* yang terintegrasi dengan Online Single Submission (OSS) untuk perijinan berusaha maupun layanan lain yang dilaksanakan di DPM-PTSP, siCANTIK dapat diakses di [sicantik.oss.go.id/oss/](http://sicantik.oss.go.id/oss/) . Untuk mengintegrasikan sistem menggunakan aplikasi MANTRA yaitu Aplikasi Manajemen Integrasi Informasi dan Pertukaran Data merupakan perangkat lunak pendukung Kerangka Kerja Interoperabilitas Sistem Informasi Elektronik dengan menerapkan teknologi Layanan Berbasis Web (*Webservices*) sebagai media pendukung Aplikasi Antarmuka/Perantara Akses Data Elektronik dalam rangka melaksanakan pertukaran data atau berbagi pakai antar Sistem Informasi Elektronik.
3. Sistem Perizinan Daerah dengan pilihan (Berdasarkan SE Menteri Dalam Negeri No. 503/4032/SJ dan No. 503/4033/SJ ) Menggunakan siCANTIK Cloud sebagai sistem perizinan berusaha atau menggunakan sistem perizinan berusaha sendiri yang terintegrasi ke siCANTIK Cloud menggunakan Aplikasi MANTRA
4. Beberapa rekomendasi model untuk implementasi atau konversi ke sistem yang baru antarlain Model *Cut Off* yaitu mengimplementasikan sistem baru dengan cara menghentikan sistem lama dan menggantikannya dengan sistem baru. Model

Paralel yaitu implementasi dengan cara sistem baru dan sistem lama sama-sama dijalankan. Setelah melalui masa tertentu, jika sistem baru telah bisa diterima untuk menggantikan sistem lama, maka sistem lama segera dihentikan. Model *Pilot Project* yaitu Pendekatan ini dilakukan dengan cara menerapkan sistem baru hanya pada lokasi tertentu yang diperlakukan sebagai pelopor. Jika konversi ini dianggap berhasil, maka akan diperluas ke tempat-tempat yang lain.

5. Adanya OSS memerlukan ketersediaan akses internet maka layanan koneksi internet harus menjangkau kesemua daerah termasuk daerah yang terpencil. Maka dari itu percepatan akses internet diperlukan ke semua SKPD, kecamatan, kelurahan dan desa. Hal ini juga termasuk percepatan program Kemenkominfo yang targetkan 5000 BTS wilayah terpencil.
6. Keterlibatan Dinas Kominfo untuk Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTP) sangat diperlukan karena semua infrastruktur dan data elektronik terpusat di Dinas Kominfo.
7. Mobile application dapat menjadi alternatif dari bentuk layanan dimasa yang akan datang.

## DAFTAR PUSTAKA

- Yoseph Hendrik Maturbongs, Riri Satria. "Perencanaan Strategis SI pada Institusi Pendidikan Tinggi Studi Kasus Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi dan Sekretaris Tarakanita". Seminar Nasional Aplikasi Teknologi Informasi (SNATI), 2011.
- Bekraf , 2017. "Buku Data Statistik dan Hasil Survei Ekonomi Kreatif" kerjasama antara Ekonomi Kreatif (Bekraf) dan Badan Pusat Statistik (BPS)".
- Bekraf, 2016. " Infografis Ringkasan Data Statistik Ekonomi Kreatif Indonesia" kerjasama antara Ekonomi Kreatif (Bekraf) dan Badan Pusat Statistik (BPS)".
- BBPPKI Makassar, 2016. "Rencana Induk Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Kabupaten Pinrang"
- Prof.Dr.Sumartono, M.S., Prof.Dr.Soesilo Zauhar, M.S., Dr.Hermawan, SIP, M.Si. "Model Sistem Monitoring Dan Evaluasi Tata Kelola Sektor Ekonomi Kreatif Untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Daerah (Kajian Atas Pengembangan Ekonomi Kreatif di

Jawa Timur). Universitas Brawijaya Malang, November 2014.

Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya, 2013. "Rencana Pengembangan Ekonomi Kreatif Kota Surabaya 2014-2015".

Dirjen Aptika Kemkominfo, 2017. Skema dukungan Kominfo Guna mendukung Implementasi Perpres 91/2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha .

A. Holil Noor Ali.2007. Materi Kuliah "Perencanaan Strategi Sistem Informasi" ITS. <https://dpmptsp.bogorkab.go.id/strategi/>